



HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI RABU, 22 MEI 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

@lenteratoday

@lenteratoday

lentera.tv

Lentera TV Media

MISI BERAT PENYERAGAMAN KAMAR INAP BPJS KESEHATAN

Penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) pada seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di 2025 menjadi misi berat. Bahkan beberapa pihak termasuk para wakil rakyat yang duduk di Senayan mengaku pesimistis terwujud tahun depan. Bahkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui tidak semua rumah sakit (RS) di Indonesia siap menerapkan sistem penyeragaman kamar tersebut. Dari target 3.060 rumah sakit mengikuti self assessment atau penilaian mandiri, hanya 2.858 rumah sakit saja yang mengisi penilaian tersebut. Dan cuma 81,6 persennya memenuhi 12 kriteria KRIS. Bahkan saat cek lapangan, sampai dengan 30 April 2024, baru ada 1.053 rumah sakit yang siap. Artinya bila KRIS digeber mulai 30 Juni 2025, otomatis jumlah RS yang menerima BPJS Kesehatan berkurang jumlahnya. Belum lagi dampak bagi keuangan rakyat karena iuran bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 2 dan 3 akan mengalami perubahan.

Baca di hal 11....



■■■■
Diberitahukan kepada pembaca setia, Kamis (23/5/2024) Koran Lentera Today tidak terbit terkait Libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Waisak 2568 BE. Terbit kembali pada Senin (27/5/2024). Update berita bisa terus diikuti melalui www.lenteratoday.com.

■■■■
**SEBERAPA SIAP
RS TERAPKAN KRIS?**

12 KRITERIA FASILITAS DAN LAYANAN YANG AKAN TERSEDIA DI SETIAP KRIS:

PEMETAAN KESIAPAN RS

- Total ada 3.176 rumah sakit yang ada di Indonesia
- Kemenkes menargetkan 3.060 rumah sakit mengikuti self assessment atau penilaian mandiri. Namun, hanya 2.858 rumah sakit saja yang mengisi penilaian tersebut.
- Dari 2.858 rumah sakit, hanya 81,6 persen rumah sakit yang memenuhi 12 kriteria KRIS, kemudian 3,3 persen memenuhi 11 kriteria, 0,9 persen memenuhi 10 kriteria, 1,2 persen memenuhi 9 kriteria, sementara sisanya atau 13 persen tidak memenuhi kriteria sama sekali.
- Hadil survei lapangan untuk memverifikasi data penilaian mandiri oleh rumah sakit, per April 2024 hanya ada 1.053 rumah sakit yang sudah memenuhi kriteria.

*Tirai atau partisi antar tempat tidur.

*Kamar mandi dalam ruangan rawat inap: Arah bukaan pintu keluar, kunci pintu dapat dibuka dari dua sisi, adanya ventilasi (exhaust fan atau jendela boven).

*Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas: Ada tulisan atau simbol "disable" pada bagian luar, memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda, dilengkapi pegangan atau handrail, permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan, dan bel perawat yang terhubung pada pos perawat.

*Outlet oksigen.

*Meja kecil per tempat tidur.

*Temperatur ruangan stabil: 20-26°C.

*Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau non-infeksi.

*Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat: Jarak antartepi tempat tidur minimal 1,5 meter, jumlah kamar dengan 4 tempat tidur, ukuran tempat tidur minimal P: 200 cm, L: 90 cm dan T: 50 - 80 cm, dan tempat tidur dua crank.

*Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.

*Ventilasi udara.

*Pencahayaannya ruangan.

*Kelengkapan tempat tidur (dilengkapi minimal dua kotak kontak dan tidak boleh percabangan atau sambungan langsung tanpa pengamanan arus).

KPK 'Cuci Tangan' Terkait Laporan Ghufron di Bareskrim

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'cuci tangan' alias tak ikut campur soal pimpinannya, Nurul Ghufron yang melaporkan Dewas ke Bareskrim Polri. Tidak ada keputusan komisioner soal aduan tersebut.

"Persoalan antara Pak Nurul Ghufron dan Dewas dan Bareskrim dan sebagainya ini kan putusan pribadi dari Pak Nurul Ghufron, bukan putusan kolektif kolegiat pimpinan," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2024).

Ke p a l a B a g i a n Pemberitaan KPK itu menjelaskan semua perlawanan Ghufron terhadap persidangan etik Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah tidak membawa nama instansi. KPK tidak mau ikut campur dalam semua gugatannya.

"Itu yang kami ingin tegaskan kembali soal baik itu laporan ke PTUN, Mahkamah Agung, maupun Bareskrim tadi yang sudah disebutkan dalam pemberitaan," ujar Ali.

Sebelumnya, Nurul Ghufron ke Bareskrim Polri membuat problematika di Lembaga Antirasuah bertambah. Setidaknya, perbincangan hangat lainnya soal eks akademisi itu berupa sidang etik, gugatan di PTUN Jakarta, dan Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi itu, Ghufron menolak dicap sebagai pimpinan paling problematik di KPK. Menurutnya, sikapnya masih legal dilakukan di Indonesia.

"Memanfaatkan, menggunakan, dan kemudian juga ya, melakukan advokasi, atau upaya hukum atas masalah-masalah saya itu adalah hal yang legal dalam negara hukum," tegas Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/5)2024).

Ghufron mengeklaim sikapnya merupakan pembelajaran bagi masyarakat. Sebab, lanjutnya, Dewas KPK memaksanya menjalankan sidang etik saat laporan sudah kedaluwarsa.

"Materi peristiwa yang diduga melanggar etik kepada saya, itu peristiwa tanggal 15 Maret (2022), terbukti di saksi-saksi saat ini, 15 Maret 2022. Pasal 23 (Perdewas KPK) menyatakan bahwa kedaluwarsanya satu tahun, tapi masih diproses ini," tegas Ghufron.

Terpisah, Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean mempertanyakan maksud Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri. Menurut



Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabeananggapi laporan yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Bareskrim Polri.

Tumpak, laporan yang dilayangkan oleh Ghufron seolah-olah memosisikan anggota Dewas KPK sebagai pelaku kriminal.

"Karena kalau seseorang dilaporkan ke sana berarti berbuat kriminal, apakah kami Dewas ini berbuat kriminal?" kata Tumpak dalam konferensi pers di KPK lama, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Tumpak mengaku belum tahu persis siapa saja anggota Dewas KPK yang dilaporkan Ghufron ke Bareskrim karena mereka belum dipanggil untuk dimintai keterangan.

Ia mengaku baru mengetahui beberapa anggota Dewas dilaporkan dari pemberitaan media. Mantan pimpinan KPK ini pun menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan amanat undang-undang untuk menegakkan etika di lembaga antirasuah.

"Itulah kekecewaan saya sedikit sekian lama kita bekerja ini baru kali ini ada begini," ujar Tumpak.

Tunda Sidang Putusan Etik

Di sisi lain, Dewas KPK memutuskan menunda sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan terkait dugaan pelanggaran etik oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang awalnya dijadwalkan berlangsung hari ini di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Penundaan tersebut dilakukan berdasarkan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang kode etik dan pedoman perilaku Ghufron.

"Oleh karena kami sudah mendapat penetapan yang memerintahkan kami untuk menunda, maka sesuai dengan kesepakatan dari pada majelis, maka persidangan ini kami tunda untuk waktu sampai dengan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap," kata Ketua Dewan KPK Tumpak

Hatorangan Panggabean selaku Ketua Majelis Sidang Kode Etik KPK dalam sidang yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2024).

Tumpak menerangkan putusan sela tersebut berlaku final dan mengikat terhadap semua pihak terkait. Pihak Dewas KPK juga telah menerima salinan penetapan dari PTUN Jakarta.

"Kami sudah menerima, sesuai dengan apa yang telah dimuat di dalam sistem informasi e-court, jadi kami terima langsung dari e-court. Oleh karena itu kami anggap resmi yang berasal dari panitra pengadilan PTUN," ujarnya.

Lebih lanjut, Tumpak tidak bisa mengatakan kapan pembacaan putusan sidang etik bisa dilakukan. Menurutnya hal tersebut akan mengacu kepada jalannya proses hukum di PTUN.

"Terpaksa kami menghormati penetapan ini, maka sidang ini kami tunda sampai nanti ada putusan pengadilan PTUN yang tetap, atau ada penetapan yang membatalkan penetapan ini," tuturnya.

Untuk diketahui, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk menunda pembacaan putusan sidang kode etik terhadap dirinya.

"Mengabulkan permohonan penundaan penggugat," demikian bunyi putusan sela yang dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Putusan sela tersebut memerintahkan tergugat untuk menunda tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama Terlapor Nurul Ghufron sebagaimana Surat Undangan Pemeriksaan Klarifikasi Nomor: R-009/DEWAS/ETIK/SUK/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024. (wid,ant,ist/dya)

DAFTAR ANGGOTA DEWAN PENGAWAS KPK :

-  Indriyanto Seno Adji (Mantan Plt. Wakil Ketua KPK 2015)
-  Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang)
-  Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
-  Harjono (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi)
-  Tumpak Hatorangan Panggabean (Mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007)

JEJAK KONTROVERSIAL NURUL GHUFRON

- Mengajukan judicial review untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK
- Pimpinan KPK terkaya ke-2 setelah Firli Bahuri. Total kekayaannya Rp 16,6 miliar pada 2022, meningkat pesat dari tahun 2021 senilai Rp 15,4 miliar.
- Diperiksa Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Pegawai Kebangsaan pegawai KPK.
- Diperiksa Dewas KPK sebagai saksi dalam sidang etik Firli Bahuri.



Saat Dicecar DPR RI, Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Tak Masuk Akal

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Nadiem Makarim berjanji pihaknya menghentikan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang nilainya tak wajar di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN). Hal itu ditegaskan Nadiem dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR, Selasa (21/5/2024).

Nadiem menyadari adanya hal-hal tidak rasional dalam kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi tersebut. "Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Tadi dari Komisi X, terima kasih sudah memberikan masukan dan saya berkomit beserta Kemendikbud untuk memastikan," kata Nadiem dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan, bahwa lompatan lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan ya," tegas dia.

Kemendikbud mula-mula akan memeriksa sejumlah PTN yang disebut mengalami kenaikan UKT fantastis. Setelah diperiksa ada kenaikan tinggi, maka Kemendikbud bakal melakukan evaluasi dan mengkaji kembali mengenai biaya UKT di PTN tersebut.

"Dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalau pun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal dan tidak berburu-buru. Tidak tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama," tegas Nadiem.

Ia menyatakan, hal ini dilakukan Kemendikbud untuk mengurangi kecemasan di masyarakat terkait isu kenaikan UKT yang tinggi.

Nadiem juga meminta pihak PTN memercayakan kepada Kemendikbud terkait aturan UKT. Selama ini, jelas dia, aturan mengenai UKT dibuat secara berjenjang. "Apa artinya? Artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak, dan yang tidak mampu, bayar lebih sedikit," kata Nadiem.

Dia mengatakan, peraturan demikian sudah terjadi sejak lama. Sebab Kemendikbud disebut mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas sebagai prinsip dasar UKT. "Ini memang azas yang sudah selama ini dilaksanakan untuk UKT di perguruan tinggi kita, karena azas keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi, harus dibela," sebut dia.

Soal Subsidi Pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede



Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim (kanan) didampingi Sekjen Kemendikbudristek Suharti (kiri) mengikuti Rapat Kerja (Raker), dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). (tangkap layar)

Yusuf heran dengan pemaparan yang disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dia menilai dari penerapan sang menteri, persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) naik seakan baik-baik saja. Tetapi di luar, isu ini membuat heboh.

"Terima kasih saudara menteri, kalau dari paparan hari ini kelihatannya aman-aman saja ya. Tapi kenapa di luar ini begitu banyak sekali masalah," kata Dede Yusuf dalam rapat kerja dengan Nadiem dan jajaran Kemendikbudristek, Selasa, (21/5/2024).

Dede Yusuf mengatakan dirinya cukup tergelitik dengan satu fakta di lapangan. Dia mengaku heran perguruan tinggi negeri yang berstatus badan hukum atau PTNBH tiba-tiba secara serempak menaikkan UKT pada tahun ini. Dia meminta Nadiem untuk menjelaskan hal tersebut lebih jauh.

"Mungkin yang menggelitik kami adalah kenapa tiba-tiba serempak PTNBH menaikkan pada tahun ini, itu yang jadi pertanyaan. Apakah karena subsidi pemerintah berkurang atau apa," kata dia.

Terkait subsidi pemerintah, Kemendikbudristek untuk mengupayakan peningkatan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Upaya peningkatan anggaran KIP Kuliah menurutnya dapat mengakomodasi lebih banyak calon mahasiswa kurang mampu agar tetap dapat mengenyam pendidikan tinggi di tengah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN).

"Harapan saya ini jadi komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbudristek, tetapi juga Komisi X. Dengan adanya kebijakan ini, baik Komisi X, maupun Kemendikbudristek, berjuang meningkatkan KIP dari tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan,"

ucapnya Nadiem.

"Komitmen kami, berjuang ke kementerian lain, dan harapan kami Komisi X berjuang meningkatkan anggaran KIP Kuliah agar yang tidak mampu masih bisa mengikuti perguruan tinggi," imbuhnya.

Menurut Nadiem, sejumlah kebijakan Kemendikbudristek beberapa waktu ke belakang telah meningkatkan jumlah penerima KIP Kuliah.

Ia menambahkan, pihaknya juga memperbesar biaya KIP Kuliah agar mahasiswa penerima bantuan pendidikan ini juga dapat kuliah di prodi yang berbiaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) lebih mahal dengan akreditasi tinggi.

Berdasarkan catatan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek, anggaran KIP Kuliah 2024 untuk 985.577 mahasiswa ongoing (yang sedang kuliah) sebesar 13,8 triliun. Sedangkan target mahasiswa baru 2024 penerima KIP Kuliah yakni sebanyak 200 ribu orang.

Sebelumnya, mahasiswa baru 2023 penerima KIP Kuliah sebanyak 161.953 orang.

"Selama ini sudah meningkat dari tahun ke tahun, banyak kebijakan kita memperbesar unit cost KIP Kuliah agar bisa masuk prodi yang lebih mahal dengan akreditasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah KIP," ucapnya.

"Karena situasi paling ideal adalah tangga UKT dilaksanakan. Mahasiswa yang mampu, membayar UKT lebih banyak. Mahasiswa yang tidak mampu, bayar lebih sedikit. Untuk melaksanakan itu secara efektif, di bagian tangga paling rendah, paling tidak mampu, diberi kesempatan lewat KIP Kuliah," ucapnya. (wid,rls,ist,ant/dya)

ANGGARAN PENDIDIKAN RI UNTUK KIP KULIAH

Sumber : Puslapdik Kemendikbudristek RI



KASUS KETUA KPU DIDUGA RAYU PPLN, DKPP GELAR SIDANG PERDANA SECARA TERTUTUP

Ketua KPU
Hasyim Asy'ari

JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana dugaan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari merayu seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Eropa pada Rabu (22/5/2024).

Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan bahwa sidang ini akan mendengarkan keterangan dari pihak terkait dan saksi ahli.

"Pihak terkait dari internal KPU dan NET TV. Pengadu mengajukan saksi ahli," kata Heddy, Selasa (21/5/2024).

Sementara itu, pesohor Deddy Mahendra Desta juga menjadi salah satu pihak terkait. Heddy membenarkan pemanggilan keduanya untuk sidang besok yang akan digelar tertutup lantaran berkaitan dengan kasus asusila. "Mereka kami panggil," ujar dia.

Keduanya dipanggil imbas video salam ucapan untuk anggota PPLN yang diduga dirayu Hasyim. Video itu diambil saat jeda sebuah acara talkshow di NET TV berkaitan Pemilu 2024 yang turut menampilkan Betty, Hasyim, Desta, dan juga Vincent Rompies serta Boiyen.

Dalam aduan terhadap Hasyim, komisioner KPU RI 2 periode itu disebut menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan romantis, dan berbuat asusila.

"Cerita pertama kali ketemu itu di Agustus 2023, itu sebenarnya juga dalam konteks kunjungan dinas. Itu pertama kali bertemu, hingga terakhir kali peristiwa terjadi di bulan Maret 2024," kata kuasa hukum korban sekaligus pengadu, Maria Dianita Prosperiani, setelah mengadu ke

DKPP, 18 April 2024 lalu.

Keduanya disebut beberapa kali bertemu, baik saat Hasyim melakukan kunjungan dinas ke Eropa, atau sebaliknya saat korban kunjungan dinas ke dalam negeri.

Kuasa hukum lainnya, Aristo Pangaribuan, menyebut bahwa dalam keadaan keduanya terpisah jarak, terdapat upaya aktif dari Hasyim "secara terus-menerus" untuk menjangkau korban. "Hubungan romantis, merayu, mendekati untuk nafsu pribadinya," kata Aristo.

Namun, menurut dia, tidak ada intimidasi maupun ancaman dalam dugaan pemanfaatan relasi kuasa yang disebut dilakukan oleh Hasyim.

Pengacara juga enggan menjawab secara tegas apakah "perbuatan asusila" yang dimaksud juga mencakup pelecehan seksual atau tidak. Korban disebut butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian membuat aduan semacam ini. Pengacara membantah korban memiliki motif politik di balik aduan ini. Ia juga mengeklaim telah menyediakan banyak barang bukti terkait tindakan Hasyim, termasuk bukti bahwa korban telah meminta agar dirinya tak diganggu.

Bukan Kasus Pertama Hasyim

Hasyim masih irit bicara ketika dikonfirmasi mengenai hal ini. "Nanti saja saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf," sebut Hasyim.

Ini bukan kali pertama Hasyim tersandung masalah etik terkait dugaan perbuatan asusila. Sebelumnya, ia pernah dinyatakan melanggar etik dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP

karena melakukan komunikasi yang tidak patut terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu alias "Wanita Emas".

Ketika itu, rangkaian persidangan yang digelar tertutup mengungkapkan bahwa Hasyim aktif berkomunikasi dengan Hasnaeni secara intensif melalui WhatsApp di luar kepentingan kepemiluan.

DKPP menilai tindakan Hasyim sebagai sebagai penyelenggara pemilu terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi yang tidak patut dengan calon peserta pemilu sehingga mencoreng kehormatan lembaga penyelenggara pemilu.

Seusai kasus Hasnaeni, Hasyim juga beberapa kali disanksi peringatan keras terakhir. DKPP beralasan, mereka tidak menambah level sanksi menjadi pemberhentian sebab tipologi kasus pelanggaran etik yang membuatnya dijatuhi peringatan keras merupakan kasus yang berlainan satu sama lain, sehingga tidak berlaku sifat akumulatif.

Secara ringkas, Ketua KPU sebenarnya sudah mendapatkan deretan sanksi peringatan keras terakhir, yakni kasus kedekatan pribadi Ketua KPU dengan salah satu bakal calon peserta pemilihan umum pada april 2023; kasus pengaturan Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; serta kasus penundaan revisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. (wid,rls,ist,ant/dya)



SEDERET SANKSI PELANGGARAN ETIK KETUA KPU HASYIM ASY'ARI

1. Bertemu peserta pemilu

Pada 18 Agustus 2022, Hasyim melakukan pelanggaran etik dengan melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta ke Yogyakarta bersama Mischa Hasnaeni Moein, yang membiayai tiket Hasyim. Meskipun Hasyim memiliki agenda resmi sebagai Ketua KPU pada 18-20 Agustus, pertemuan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

2. Salah hitung kuota minimal 30 persen perempuan calon anggota DPR/DPRD

Hasyim melanggar kode etik Pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU 10 Tahun 2023 terkait pembulatan ke bawah dari 30 persen pencalonan perempuan dalam pemilu DPR/DPRD. DKPP menilai Hasyim seharusnya memiliki pengetahuan kepemiluan yang cukup. Sikap KPU menyebabkan ketidakpastian hukum bagi peserta pemilu. Hasyim dijatuhi sanksi peringatan keras pada 10 Oktober 2023.

3. TERIMA PENCALONAN GIBRAN RAKABUMING RAKA

Hasyim dan enam anggota KPU lainnya, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz, diadukan ke DKPP atas penerimaan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada 25 Oktober 2023. DKPP menilai Hasyim gagal menunjukkan kepemimpinan profesional dan melanggar Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP tentang Kode Etik.

4. Kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara

Pelanggaran etik terbaru Hasyim adalah dalam rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023-2028, diadukan oleh Linda Hepy Kharisda Gea. Hasyim dinyatakan melanggar Pasal 44 Ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2023 dan beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik.

5. Kebocoran Data

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan daftar pemilih tetap yang diduga bocor pada akhir 2023, Selasa, 14 Mei 2024. Ditegaskan, pengendali data pribadi berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

STEVENS-JOHNSONS SYNDROME YANG DIIDAP SELEBRITI KARTIKA PUTRI

SELEBRITI Kartika Putri belakangan membagikan kisahnya melawan penyakit langka Stevens-Johnson Syndrome.

Melalui akun instagramnya dia membagikan foto wajahnya yang mulus tapi ternyata berbalut filter. Kulit wajah aslinya ternyata belang dan banyak bercak, lantaran pengaruh dari penyakit langka tersebut.

"Aku tidak seglowng filter medsos guys. Paska Stevens Johnsons Syndrom 4 bulan lalu bekasnya masih belum bisa hilang," tulisnya.

Mengenal Stevens-Johnsons Syndrome

Steven Johnsons Syndrome adalah salah satu penyakit yang tergolong sangat langka. Penyakit ini merupakan reaksi alergi yang menimbulkan ruam dan lepuhan di kulit, lisan bola mata, rongga mulut, hingga kelamin.

Apabila tidak ditangani dengan segera, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi serius dan bahkan menyebabkan kematian.

Penyakit ini disebabkan oleh berbagai faktor, bisa karena konsumsi obat-obatan atau karena serangan virus.

Beberapa obat-obatan yang bisa menyebabkan Steven Johnsons Syndrome berikut ini:

1. Obat asam urat seperti allopurinol
2. Obat untuk mengatasi kejang dan penyakit jiwa (antikonvulsan dan antipsikotik)
3. Sulfonamida antibakteri/antibiotik (termasuk sulfasalazine)
4. Antivirus seperti Nevirapin (Viramune, Viramune XR)
5. Obat pereda nyeri, seperti acetaminophen (Tylenol, lainnya), ibuprofen (Advil, Motrin IB, lainnya) dan naproxen sodium (Aleve)

Faktor Risiko Steven Johnsons Syndrome Beberapa faktor risiko yang menyebabkan seseorang terkena penyakit ini termasuk:

1. Infeksi HIV. Di antara orang dengan HIV, kejadian sindrom Stevens-Johnson sekitar 100 kali lebih besar dibandingkan pada populasi umum.

2. Sistem kekebalan tubuh melemah. Sistem kekebalan tubuh dapat dipengaruhi oleh transplantasi organ, HIV/AIDS, dan penyakit autoimun.

3. Kanker. Penderita kanker, khususnya kanker darah, mempunyai risiko lebih tinggi terkena sindrom Stevens-Johnson.

4. Riwayat sindrom Stevens-Johnson. Jika Anda pernah mengalami kondisi ini terkait pengobatan, Anda berisiko mengalami kekambuhan jika menggunakan obat tersebut lagi.

5. Riwayat keluarga sindrom Stevens-Johnson. Jika ada kerabat dekat yang menderita sindrom Stevens-Johnson, Anda mungkin berisiko lebih tinggi terkena sindrom tersebut juga.

6. Faktor genetik. Memiliki variasi genetik tertentu membuat risiko terkena penyakit ini lebih tinggi, terkena sindrom Stevens-Johnson, terutama jika Anda juga mengonsumsi obat untuk kejang, asam urat, atau penyakit mental.

Profil

Celotehanya di dunia presenter mengantarkan Kartika Putri mendulang popularitas di layar kaca.

Wanita kelahiran Palembang 20 Januari 1991 ini mengawali kariernya di dunia presenter saat memandu acara kuis interaktif "Rejeki Malam" yang tayang di ANTV pada 2011 saat usianya menginjak 20 tahun.

Namun, namanya mulai melejit setelah menjadi co-host Kakek-kakek Narsis (KKN) yang tayang di Trans TV pada tahun 2012. Dalam acara tersebut, Kartika berperan sebagai Nanny yang seksi, pengasuh kakek-kakek mesum.

Setelah memandu acara KKN tersebut, Kartika mulai kebanjiran tawaran. Ia pun mengasah kemampuan akting untuk film layar lebar perdananya, "Nenek Gayung" yang tayang tahun 2012. Meski belum

sebagai peran utama. Di tahun yang sama pula, Kartika berperan untuk film layar lebar "Mama Minta Pulsa".

Kartika semakin melambung setelah ikut meramaikan acara Pesbukers bersama Olga Syahputra dan Jessica Iskandar di ANTV. Ciri khasnya dengan logat tegal yang terkesan ndeso menjadikan Kartika sosok unik yang berbeda. Ia mempelajari logat dan bahasa Tegal dari pembantunya di rumah yang kebetulan memang berasal dari sana.

Kehadiran Kartika semakin ditunggu penggemarnya sebagai presenter kuis, gosip, musik di berbagai program stasiun televisi. Acara yang dipandunya, Dahsyat, Hot Spot, Sebelas Duabelas, dan D'Academy Celebrity. Ia pun bebas bercelotoh di layar kaca sebagai pembawa acara (Bisnis/Viva)



SAMBANGI OPD MALANG RAYA, LENTERATODAY KOMITMEN TINGKATKAN SINERGI DAN KOLABORASI



Agenda Media Visit Tim Redaksi Lenteratoday di Kantor Diskominfo Kota Batu, Selasa (21/5/2024).



Visit Media: Tim Redaksi serta Perwakilan Pimpinan Lenteratoday bersama perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Selasa (21/5/2024).

MALANG- Tim redaksi serta perwakilan Pimpinan Lenteratoday melakukan kunjungan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Malang Raya, Selasa (21/5/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang telah terbangun selama ini.

Redaktur Pelaksana Lenteratoday, Agustina Widyawati, menegaskan pentingnya kerjasama yang terjalin antara media dan pemerintah. Oleh karena itu, sejak berdirinya Lenteratoday, legalitas dalam operasional media menjadi hal utama yang dijunjung oleh redaksi.

"Kami sedari awal berdiri, memang menginginkan semuanya

sesuai dengan jalurnya. Sehingga sebelum kami melaunching redaksi pun, kami sudah mengurus semua perizinan karena legalitas itu sangat penting," ujar Widyawati, saat melakukan media visit di Kantor Disporapar Kota Malang, Selasa (21/4/2024).

Dengan berfokus pada pada segmen pemerintahan, politik, ekonomi dan pendidikan, Widyawati berharap agar sosialisasi dan publikasi di bidang-bidang tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Terlebih menurutnya, Presiden RI, Joko Widodo, juga telah menyatakan, media konvensional berperan penting dalam menjernihkan informasi yang beredar di media sosial.

Diketahui, dalam media visit di

Malang Raya ini, beberapa OPD juga mengupas berbagai isu dan rencana yang menjadi fokus mereka. Serta mengulik pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan media konvensional.

Salah satunya OPD pertama yang dikunjungi oleh Lenteratoday, yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Dalam hal ini, Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi, mengakui kekuatan media dalam menginformasikan pembangunan kepada masyarakat.

Menurutnya, pemberitaan media konvensional juga diyakini menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terlebih di era media sosial yang memiliki dampak luar biasa dalam membentuk opini publik.

"Ada satu komentar saja (yang menggiring opini) di postingan, itu bisa mengalahkan ribuan komentar lainnya yang sifatnya positif. Makanya, saya tahu betul bahwa kerjasama dengan awak media konvensional ini tidak bisa begitu saja diabaikan," ujar Baihaqi.

Dalam kesempatannya, Baihaqi juga menuturkan saat ini, Disporapar Kota Malang tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025. Di mana setiap akhir pekan, ada berbagai event kejuaraan olahraga yang diselenggarakan sebagai bagian untuk menggemakan sosialisasi Porprov di Kota Malang.

"Makanya, kami dari Disporapar juga menyadari tidak bisa kerja



Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Baihaqi, saat berbincang dengan Redaktur Pelaksana Lenteratoday, Agustina Widyawati, Selasa (21/5/2024).



Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyambut hangat agenda visit media Perwakilan Pimpinan serta tim Redaksi Lenteratoday di Kantor Dishub Kota Malang, Selasa (21/5/2024). (Iskandar/Lenteratoday)



Disambut hangat, Tim Redaksi dan Perwakilan Pimpinan Lenteratoday berfoto bersama Kepala Disporapar Kota Malang, Baihaqi.



Bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, Tim Redaksi Lenteratoday disambut hangat ketika berkunjung di Kantor Dishub Kota Malang, Arjosari, Selasa (21/5/2024).

sendiri. Dengan keterbatasan sumber daya kami, kami memang masih butuh tangan dari teman-teman media termasuk Lenteratoday," tuturnya.

Selain Porprov, Disporapar juga membawahi bidang pariwisata, yang saat ini terdapat 4 kampung tematik di Kota Malang yang tengah mengikuti ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024. Kampung-kampung tersebut yakni Kampung Tempe Sanan, Kampung Hijau Glintung, Kampung Budaya Polowijen, dan Kampung Warna-warni Jodipan (KWJ).

"Dari 4 itu, sekarang sudah masuk ke 500 besar dari sebelumnya lolos seleksi di 6000 an kampung se Indonesia," pungkasnya.

Usai mengunjungi Disporapar Kota Malang, tim Redaksi Lenteratoday melanjutkan agenda visit media menuju Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu. Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Adriyanto, menyambut positif

kedatangan tim Lenteratoday di ruangan kerjanya.

Senada dengan Baihaqi, Onny juga menekankan pentingnya kerjasama yang terjalin dengan media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan kredibel kepada masyarakat.

Dalam paparannya, Onny menyoroti selektivitas dalam memilih media untuk kerjasama, dengan salah satu persyaratan utama yakni verifikasi faktual dari Dewan Pers.

"Kami menyadari bahwa kerjasama dengan media itu memang dibutuhkan. Dan kami pun, kerjasama dengan para media juga sudah cukup banyak dan kami sudah pilih se selektif mungkin," ungkapnya.

Onny menjelaskan, Diskominfo Kota Batu berupaya untuk terus bersinergi dengan keterbatasan anggaran yang ada, dengan fokus pada pengumpulan data dan integrasi aplikasi untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tepat waktu dan akurat.

Memanfaatkan waktu selama berada di Malang Raya, tim redaksi Lenteratoday pun melanjutkan silaturahmi ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Dalam kesempatan ini, Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyambut baik kehadiran media Lenteratoday.

"Silaturahmi ini merupakan kehormatan bagi kami. Karena ini menunjukkan sama butuhnya antara pemerintah dengan media," ujarnya.

Pria yang akrab dengan sapan Jaya ini mengatakan, saat ini kebijakan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Dishub Kota Malang seringkali menjadi sorotan masyarakat. Bahkan sering mengundang komentar warganet apabila telah tersebar luas di media sosial.

Oleh karena itu, Jaya mengharapkan, keberadaan media konvensional seperti Lenteratoday, mampu menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat, serta dapat berfungsi sebagai

klarifikasi terhadap informasi yang bersifat negatif di yang tersebar di media sosial.

"Kami harapan memang untuk ke depannya, penganggaran publikasi dan kerjasama dengan media dapat terus ditingkatkan. Ya memang kami butuh untuk menyampaikan informasi ke masyarakat melalui media konvensional ini," tambahnya.

Dengan adanya komitmen dari kedua belah pihak, baik Disporapar Kota Malang, Diskominfo Kota Batu dan Dishub Kota Malang, menunjukkan keseriusan para OPD dalam menjalin hubungan yang baik dengan media konvensional. Demi menyampaikan informasi yang transparan dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

Dalam kunjungan ini, Lenteratoday juga menyampaikan berbagai kerjasama yang berfokus pada peningkatan pemberitaan lokal yang informatif dan edukatif. Serta meningkatkan peran media dalam mendukung pembangunan daerah.(Santi/Dya)



Kerjasama dengan media adalah jembatan penting untuk menghubungkan informasi dengan masyarakat. Kami memilih mitra dengan selektif, karena kebenaran adalah tanggung jawab bersama."

ONNY ADRIYANTO
Kepala Diskominfo Kota Batu,



Kehadiran media dalam silaturahmi ini adalah cerminan dari pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media. Terlebih dalam menyampaikan informasi yang jernih dan akurat kepada masyarakat."

WIDJAJA SALEH PUTRA
Kepala Dishub Kota Malang



"Saya tahu betul bahwa kerjasama dengan media konvensional ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Karena dengan kebersamaan, insyaallah akan lebih kuat dalam menangkal banyaknya informasi miring di media sosial."

BAIHAQI
Kepala Disporapar Kota Malang





BEBERAPA CARA ATASI BATUK BERDAHAK SECARA ALAMI

BATUK menjadi salah satu penyakit yang sering muncul saat musim hujan maupun perubahan musim yang tidak menentu.

Kondisi tersebut mampu memicu terjadinya batuk berdahak, yang menghambat saluran pernapasan pada manusia.

Batuk berdahak merupakan batuk yang disertai dengan cairan dahak, dan terjadi secara terus menerus, akibat adanya aliran dari paru-paru hingga menuju ke atas tenggorokan. Jika Anda mengalami batuk berdahak, refleks batuk terjadi secara cepat ketika debu di udara masuk melalui sistem saraf.

Dilansir dari healthline.com dan gleneagles.com, Selasa (21/5/2024), gejala batuk berdahak dicirikan oleh adanya penumpukan dahak pada saluran pernapasan, yang diakibatkan oleh adanya virus dan bakteri di sekitar organ tersebut.

Ketika dahak menumpuk secara penuh, Anda akan mengalami kesulitan dalam bernapas, disertai dengan rasa sakit di belakang tenggorokan.

Maka dari itu, diperlukan adanya

penanganan yang tepat supaya batuk tersebut dapat mereda. Penanganan yang dapat dilakukan adalah mengobati dengan bahan-bahan alami di lingkungan sekitar.

Simak beberapa cara mengatasi batuk berdahak secara alami:

1. Konsumsi madu

Madu memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, salah satunya mengobati batuk berdahak. Menurut penelitian di tahun 2021, madu menjadi media pengobatan yang tepat untuk mengobati infeksi saluran pernapasan dan batuk berdahak secara efektif.

Kandungan polifenol dan antioksidan dalam madu, mampu mengoptimalkan kesehatan tubuh serta meredakan rasa sakit di sekitar area peradangan.

2. Konsumsi teh jahe

Jahe merupakan salah satu bentuk tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan antioksidan dan inflamasi di dalamnya, mampu menangkal radikal

bebas serta memberikan perlindungan bagi tubuh. Menurut studi tahun 2020, konsumsi teh jahe mampu mengatasi peradangan dan memberikan sensasi penenang pada area tenggorokan.

3. Konsumsi teh cengkeh

Cengkeh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, salah satunya mengandung sifat antimikroba. Keduanya sama-sama memiliki khasiat yang baik untuk melawan infeksi saluran pernapasan. Anda dapat mengonsumsi kedua jenis rempah tersebut untuk dijadikan sebagai teh, yang cocok dikonsumsi saat batuk.

4. Konsumsi nanas

Nanas memiliki kandungan bromelain, selaku enzim yang mampu mengurangi intensitas batuk dan mengurangi produksi dahak di dalam tubuh. Anda mampu mengonsumsi nanas melalui jus maupun dikonsumsi langsung tanpa bahan campuran lainnya.

Namun, jika Anda mengalami

peradangan dan batuk yang parah, segera konsultasi kepada dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

5. Berkumur dengan air garam

Garam memiliki manfaat yang baik untuk menenangkan rasa sakit di tenggorokan. Garam mengandung antibakteri dan antiradang, yang mampu membunuh bakteri serta mengurangi peradangan di dalam tubuh (Bisnis)



PELAJAR ITALIA GUNAKAN AI UNTUK MENGERJAKAN TUGAS SEKOLAH

ANGKA menunjukkan jika semakin banyak siswa Italia yang menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas sekolah, demikian hasil survei terbaru yang dikutip dari Xinhua pada Selasa (21/5/2024).

Sekitar 65 persen siswa berusia antara 16 dan 18 tahun mengatakan bahwa mereka secara teratur menggunakan ChatGPT dan alat serupa untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Sementara, 71 persen melakukan pencarian AI untuk menemukan informasi.

Sebuah survei yang dijalankan perusahaan teknologi Tgm Research pada platform anti-plagiarisme Italia yang bernama NoPlagio, melibatkan sekitar 1.000 siswa Italia yang terdaftar di sekolah menengah. Sebanyak 33 persen mengatakan bahwa alat bantu AI sangat membantu dalam studi mereka.

Secara geografis, kota-kota besar di Italia berada di garis depan, dengan 60 persen siswa laki-laki dari Napoli mengatakan bahwa mereka secara teratur menggunakan AI, diikuti oleh 56 persen di Milan dan 53 persen di Roma.

Untuk masa depan, sebagian besar siswa laki-laki (71 persen) dan perempuan (65 persen) mengatakan bahwa mereka akan terus menggunakan alat bantu AI untuk pendidikan mereka.

Pada saat yang sama, kaum muda Italia mengungkapkan beberapa kekhawatiran atas kemungkinan dampak negatif dari AI.

Sementara 31 persen mengatakan bahwa AI dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan 64 persen



khawatir tentang penggunaan yang tidak dibatasi di sekolah atupun tempat kerja.

Hasil survei ini muncul di tengah meningkatnya upaya promosi dalam memanfaatkan alat AI yang aman dan sadar, terutama di dunia pendidikan.

Sekitar 8.000 lokakarya dan lebih dari 160 kursus pelatihan tentang AI bagi para guru telah diberikan kepada sekolah-sekolah negeri di seluruh Italia dalam dua tahun terakhir.

Sejak Parlemen Eropa menyetujui Undang-Undang AI pada bulan Maret, penggunaan AI telah diatur di negara-negara anggota Uni Eropa.

Undang-undang ini merupakan kerangka hukum pertama mengenai AI di tingkat global, dan telah dibuat berdasarkan pendekatan berbasis risiko, yang berarti aplikasi AI yang dianggap berpotensi menimbulkan risiko akan dikenai aturan lebih ketat.

Sementara itu, beberapa di antaranya sepenuhnya dilarang, seperti sistem kategorisasi biometrik

berdasarkan karakteristik sensitif, dan pengikisan gambar wajah yang tidak ditargetkan dari internet atau rekaman CCTV.

Undang-undang Uni Eropa juga tidak mengizinkan alat AI untuk memungkinkan pengenalan emosi di sekolah dan tempat kerja, penilaian sosial, atau pemolisian prediktif.

Pada bulan April, kabinet Italia juga mengeluarkan keputusan domestik tentang AI. Sejalan dengan peraturan Uni Eropa, dekret Italia menegaskan promosi alat AI, tetapi dengan mematuhi prinsip-prinsip transparansi dan keamanan, termasuk perlindungan data pribadi, eksploitasi ekonomi, dan kerahasiaan.

Di Indonesia

Penggunaan asisten berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) kini makin marak di kalangan pelajar Indonesia.

AI atau Kecerdasan Buatan adalah ilmu pengetahuan dan teknik yang

membuat mesin mampu menunjukkan kemampuan layaknya kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, dan lainnya.

Riset terbaru International Data Corporation Indonesia (2023) memproyeksikan penggunaan asisten berbasis AI untuk keperluan pendidikan di Indonesia akan mencapai lebih dari 3,2 juta pengguna pada 2024. Claude.ai adalah salah satu contoh asisten AI hasil karya perusahaan teknologi bernama Anthropic asal Amerika Serikat yang kini digunakan lebih dari 850 ribu pelajar di Indonesia.

Survei di 10 SMA Jakarta tahun 2023 menunjukkan sebagian besar siswa sebanyak 89% menggunakan Claude.ai untuk mengerjakan tugas sekolah. Akibatnya, Siswa menjadi malas berpikir dan memecahkan masalah sendiri karena terbiasa mengandalkan Claude.ai.

Ditemukan pula penurunan kemampuan kritis siswa dalam menganalisis informasi. Selain itu, ketergantungan Claude.ai berisiko membuat siswa tak lagi kreatif mengerjakan tugas.

Menanggapi kondisi ini, Prof. Randi Pramudya, pakar pendidikan dari Universitas Indonesia, mengingatkan perlu ada pendampingan orangtua dan guru agar penggunaan Claude.ai tetap bijak, tak berlebihan, serta tepat guna meningkatkan produktivitas belajar.

Jika kecenderungan ketergantungan berlebih pada Claude ini tidak dikendalikan, diperkirakan akan semakin melemahkan kemampuan berpikir kritis dan analitis generasi penerus bangsa. (Lenteratoday/Medcom)





KIAT DIET SEHAT BAGI PENDERITA OBESITAS

DOKTER gizi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dr. Nurul Ratna Mutu Manikam menjelaskan beberapa kondisi saat seseorang didiagnosis obesitas dan kiat diet yang tepat, seperti mengatur porsi makanan dan melakukan olahraga teratur.

“Seseorang dikatakan kegemukan atau obesitas apabila indeks massa tubuhnya berada di atas angka 25 kg per meter persegi,” kata Nurul Ratna dalam gelaran wicara daring di Jakarta.

Dokter lulusan pendidikan dokter spesialis gizi klinis Universitas Indonesia itu menambahkan, “Indeks massa tubuh ini dilakukan dengan mengukur berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat”.

Jika seseorang memiliki indeks massa tubuh di atas 25 kg per meter persegi, Nurul menyarankan agar orang tersebut segera melakukan diet sehat.

Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit yang

dapat muncul akibat obesitas, seperti serangan jantung koroner, stroke, diabetes, dan lainnya.

Nurul pun membagikan sejumlah kiat untuk melakukan diet sehat agar massa lemak dalam tubuh dapat berkurang, tetapi tidak menghilangkan gizi penting yang dibutuhkan tubuh.

“Yang paling aman adalah low calory diet dan very low calory diet, artinya makanan itu diatur dalam jumlah porsi dan cara pengolahannya,” ujarnya.

Meski membutuhkan waktu lebih lama untuk menurunkan massa tubuh dibandingkan jenis diet lainnya, low calory diet dinilai lebih alamiah dan aman dilakukan dalam jangka waktu panjang. Bahkan, jenis diet ini dapat dilakukan hampir semua orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.

“Jadi, pengaturan makannya harus teratur, ada makan pagi, makan siang, dan makan sore, lalu ada snack agar di antara jam makan itu kita nggak

terlalu kalap (ambil banyak makanan),” kata Nurul.

Dia melanjutkan, “Untuk jumlahnya kita kurangi, misalnya mengurangi nasi seperempat bagian saja dari porsi biasanya”.

Selain mengatur porsi makanan, penting mengolah makanan untuk diet. Sebaiknya, kurangi makanan bersantan, makanan yang digoreng, dan makanan yang ditambah dengan bahan-bahan tinggi lemak, seperti keju dan krim.

“Jadi, makanannya itu diolah tanpa minyak, misalnya dipanggang, atau minyak sedikit untuk menumis, dikukus, itu cara paling sehat dan alamiah,” kata dia.

Nurul pun menyarankan untuk selalu konsisten melakukan diet low calory ini agar massa tubuh lebih cepat turun ke angka ideal.

Hindari cheating day atau hari khusus untuk mengonsumsi makanan apapun guna mempercepat penurunan massa tubuh.

Selain menjaga pola makanan, dia mengingatkan untuk melakukan olahraga teratur dan jangan malas bergerak.

Untuk penderita obesitas berat, sebaiknya lakukan olahraga yang tidak menggunakan beban tubuh, seperti sepeda statis, berenang, dan berjalan kaki di kolam air (khusus penderita obesitas tanpa luka terbuka).

Setelah massa tubuh berkurang banyak, penderita obesitas sudah boleh melakukan aktivitas olahraga lainnya. Misalnya treadmill, jalan cepat, atau olahraga yang sifatnya high impact. “Menurut saran WHO, kalau mau menurunkan berat badan, olahraganya harus 200-300 menit per minggu, tetapi setidaknya belajar dulu olahraga 150-200 menit per minggu,” katanya.

“Dengan turun 15-20 persen saja, penyakit yang tadi saya sebutkan akan berkurang sendiri,” demikian dijelaskan dr. Nurul Ratna Mutu Manikam (Antara)



“Yang paling aman adalah low calory diet dan very low calory diet, artinya makanan itu diatur dalam jumlah porsi dan cara pengolahannya, jadi, pengaturan makannya harus teratur, ada makan pagi, makan siang, dan makan sore, lalu ada snack agar di antara jam makan itu kita nggak terlalu kalap (ambil banyak makanan),”

dr. Nurul Ratna Mutu Manikam

Misi Berat ... (dari Hal 1)

KELAS Rawat Inap Standar (KRIS), pengganti kelas BPJS Kesehatan, mulai berlaku paling lambat 30 Juni 2025. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Yuli Astuti Saripawan, menuturkan tugasnya mendampingi perbaikan RS agar memiliki 12 kriteria sesuai aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Untuk melihat kesiapan, karena begitu banyaknya rumah sakit, kami membuka melalui self assessment, jadi rumah sakit mengisi sendiri melalui RS online. Semua sudah tergambar rumah sakit yang sudah memenuhi kriteria 1 misalnya kriteria 1-9 atau 1-10," jelasnya saat diskusi Dialektika Demokrasi DPR, Selasa (21/5/2024).

Dari total 3.176 rumah sakit yang ada di Indonesia, Yuli menyebutkan, Kemenkes menargetkan 3.060 rumah sakit mengikuti self assessment atau penilaian mandiri. Namun, hanya 2.858 rumah sakit saja yang mengisi penilaian tersebut.

Yuli memaparkan dari 2.858 rumah sakit, hanya 81,6 persen rumah sakit yang memenuhi 12 kriteria KRIS, kemudian 3,3 persen memenuhi 11 kriteria, 0,9 persen memenuhi 10 kriteria, 1,2 persen memenuhi 9 kriteria, sementara sisanya atau 13 persen tidak memenuhi kriteria sama sekali.

Meski begitu, pihak Kemenkes tetap melakukan survei lapangan untuk memverifikasi data penilaian mandiri oleh rumah sakit. Hasilnya, per April 2024 hanya ada 1.053 rumah sakit yang sudah memenuhi kriteria.

"Dari tahun 2023 kemarin yang sudah memang memenuhi realisasi kita cek betul ada 995. Kemudian di tahun 2024 sampai dengan 30 April kemarin, kami melihat ada 1.053 rumah sakit. Jadi sesuai enggak dengan dia melakukan penilaiannya sendiri," ungkap Yuli.

Selain itu, Yuli menyebutkan berdasarkan evaluasi Kemenkes, kriteria paling sulit terealisasi adalah kamar mandi dalam dan outlet oksigen sentral terutama di rumah sakit kelas C dan D. Pasalnya, rumah sakit biasanya menggunakan oksigen tabung.

"Itu yang agak sulit dengan 12 kriteria, yang seperti saya sampaikan, ada kamar mandi dalam dan oksigen itu agak sulit. Tapi kalau yang lainnya rata-rata memenuhi," tuturnya.

Untuk mengatasi kesulitan fasilitas di rumah sakit kelas C dan D, Yuli mengusulkan pemerintah setempat bisa melakukan intervensi dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Mereka yang memang kekuatan dia tidak mampu, kita support melalui dana DAK untuk melakukan renovasi, judulnya bukan bangunan baru. Karena secara pembiayaan kan kita tidak mungkin ya, itu yang masih mungkin sedang kita pikirkan. Tetapi kami mendorong," pungkas Yuli.

Sebelumnya, pemerintah akan menerapkan sistem KRIS paling lambat paling lambat 30 Juni 2025. Aturan termuat dalam Jaminan Kesehatan di Indonesia dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024.

Nantinya, iuran bagi para peserta tidak lagi sama seperti BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3, namun akan disesuaikan bagi peserta dari golongan kaya atau miskin.

Berdasarkan pasal 103B ayat (7) yang ditambahkan dalam Perpres 59/2024, disebutkan hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penetapan manfaat, tarif, dan iuran.

Penetapan manfaat, tarif, dan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat tanggal 1 Juli 2025.

Sementara, Menteri Kesehatan (Menkes RI), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan nasib iuran peserta kelas 1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) saat Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) ditetapkan secara keseluruhan pada 2025 mendatang.

Budi mengatakan bahwa hingga saat ini besaran iuran yang akan ditetapkan untuk sistem KRIS, termasuk bagi peserta kelas 1 BPJS Kesehatan masih belum dapat ditetapkan. Sebab, masa transisi implementasi KRIS masih berlangsung hingga 30 Juni 2025 mendatang.

Namun, menteri yang disapa BGS itu mengatakan bahwa iuran KRIS bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 1 saat ini berpotensi akan sama alias tidak perubahan. Namun, iuran bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 2 dan 3 akan mengalami perubahan.

"Sepemahaman saya kelas 1 [iurannya] tetap, ini yang akan berpengaruh [iuran] yang kelas 2 dan kelas 3," ungkap Budi saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Saat dikonfirmasi kembali terkait bagaimana perubahan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan kelas 1 saat KRIS ditetapkan, Budi menyebut masih akan difinalisasi karena berpotensi ada penyesuaian. "Itu nanti akan difinalkan karena siapa tahu nanti terpikir bahwa kita perlu ada adjustment (penyesuaian)," kata Budi.

"Iya (kemungkinan nominal iuran naik atau turun)," sambungnya.

Sementara itu terkait wacana iuran BPJS Kesehatan yang akan dijadikan satu tarif atau tunggal saat pemberlakuan KRIS, BGS mengaku hal itu masih dikaji.

"Itu memang iuran single-nya masih dikaji, tuh, karen masih ada waktu, kan satu tahun," jelas Budi.

"Sedang dikaji. Bagaimana mengombinasikan yang kelas 2 dan kelas 3-nya dan tarifnya pada level berapa," lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pembiayaan Kemenkes RI, Dr. Ahmad Irsan menegaskan bahwa BPJS Kesehatan, Kemenkes RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu

RI), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) baru akan menetapkan tarif dan manfaat KRIS sesuai dengan hasil evaluasi selama masa transisi yang telah diberlakukan. Ia mengungkapkan, penetapan dilakukan paling lambat 1 Juli 2025.

Adapun, evaluasi terkait implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024 akan terus dilakukan hingga 30 Juni 2025.

Pesimistis dan Potensi Masalah

Pemerintah mengklaim penerapan KRIS akan meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Lewat sistem KRIS, peserta BPJS Kesehatan mendapatkan standar layanan rawat inap yang sama sehingga tidak dibedakan sesuai besaran iuran kelas.

Menyikapi hal tersebut, Timboel Siregar Koordinator Advokasi BPJS Watch menyatakan, dalam Perpres No 59 tahun 2024 telah ditentukan 12 komponen yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan untuk mencapai KRIS.

"Tetapi memang belum dirumuskan secara detail terkait dengan jumlah ruang perawatannya. Jadi sampai sekarang belum ada, apakah (kelas) I, II, atau III. Berapa iuran peserta mandiri, belum juga disebutkan. Jadi Perpres No 59 tahun 2024 memang sudah menyebut, tapi belum bisa dilaksanakan secara lebih pasti," ujarnya Selasa (21/5/2024) pagi.

Timboel Siregar mengatakan bahwa pelaksanaan KRIS ini memang dilakukan secara bertahap. Ia menyebut tak ada penghapusan kelas pada saat ini.

Ketika KRIS diterapkan pada tahun depan, maka rumah sakit yang menyelenggarakan dan bekerja sama dengan BPJS harus gunakan satu ruang perawatan.

"Ini yang sampai sekarang belum ada kepastian. Akan tetapi, dari wacana, narasi, dan uji coba rumah sakit yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, itu menggunakan satu ruang perawatan dengan maksimal empat tempat tidur, dengan 12 kriteria," sebutnya.

Timboel Siregar juga mencium potensi masalah jika KRIS diterapkan tahun pertama. Pertama, terkait dengan akses ruang perawatan.

Akses ruang perawatan, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2021, disebutkan bahwa total ruang perawatan yang ada di rumah sakit swasta minimal 40 persen bisa untuk KRIS. Sedangkan untuk rumah sakit milik pemerintah, minimal 60 persen untuk KRIS.

"Jika dilaksanakan tahun depan, maka ada upaya membatasi upaya. Akses ruang perawatan terkendala. Tidak seluruhnya diaplikasikan untuk pasien JKN. Jadi dibatasi," ujarnya.

Nah, ini yang akhirnya membuat pasien mengalami risiko. Pertama, ia harus mencari ruang perawatan lain atau rumah sakit lain. Kedua, pasien bisa pakai ruang lain tapi menjadi pasien umum. Ketiga pasien memakai di kelas atasnya dengan membayar

selisih biaya.

"Nah ini kan menjadi persoalan. Kalau sekarang kan seluruh ruang perawatan (kelas) I, II, dan III kan digunakan oleh peserta JKN. Kalau penggunaan KRIS satu ruang perawatan, maka akan ada upaya pembatasan," sebutnya.

Selain itu, penerapan KRIS juga membuat iuran berdasarkan kelas yang selama ini telah diterapkan, akan dihilangkan. Sebagai gantinya, peserta BPJS akan membayar satu iuran tunggal.

"Kemungkinan antara Rp42 ribu hingga Rp100 ribu," ujar Timboel Siregar.

"Misalnya diputuskan iurannya Rp70 ribu. Yang kelas I dan II tidak masalah, sebab (iuran) mereka turun. Namun yang dari kelas III akan naik. Padahal iuran Rp35 ribu saja banyak yang menunggak. Total peserta mandiri yang menunggak saat ini sekitar 15 juta orang. Apalagi jika iuran itu dinaikkan," sambungnya.

Menurut Timboel Siregar, hal tersebut berpotensi membuat masyarakat yang selama ini mengikuti kelas III, tidak mendapatkan layanan karena menunggak.

"Artinya apa? Semakin banyak masyarakat yang tidak digamin JKN," sebut Timboel Siregar.

Selain itu, iuran tunggal juga membuat potensi pendapatan BPJS Kesehatan menurun. Sebab jumlah iuran dari Kelas I dan II bakal lebih dengan skema iuran tunggal. "Ini akan menyebabkan pembiayaan tak bisa dijalankan, akhirnya terjadi defisit," ujarnya.

Kemudian, penerapan KRIS juga membuat rumah sakit akan merenovasi kamar sesuai dengan aturan. Renovasi ini tentu saja memerlukan biaya. Sementara rumah sakit swasta belum tentu memiliki dan untuk renovasi tersebut.

"Ini persoalan bagaimana dalam setahun ini, rumah sakit swasta bisa menyelaraskan dengan kriteria ini. Kalau tidak bisa mengikuti kriteria KRIS, maka tidak bisa kerja sama. Kalau tidak kerja sama, artinya masyarakat JKN tidak bisa menggunakan rumah sakit itu. Sehingga sisi suplai berkurang lagi dan aksesnya akan susah lagi," jabar Timboel Siregar.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo pesimistis Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan bisa diimplementasikan mulai Juni 2025. Pasalnya, meskipun rumah sakit disiapkan, kebijakan KRIS tidak diimbangi konsep pembiayaan asuransi pemerintah tersebut.

"Kalau belum ada desain anggaran, rasanya masih kurang sempurna," kata Rahmad dalam acara diskusi 'BPJS Kesehatan dengan KRIS, Permudah Layanan atau Jadi Beban?' di DPR RI, Selasa, 21 Mei 2024. "Pesimistis, bukan berarti tidak mendukung."

Menurut Rahmad, jika konsep pembiayaan belum disiapkan, penerapan KRIS BPJS berpotensi mundur dari target. Kalaupun ada wacana kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta, ia berujar, detail konsepnya belum jelas. (wis,ssr,ant,tmp,ist/dya)

Waswas Serangan Teroris di Malaysia, 'Lone Wolf' atau Jemaah Islamiyah?

JAKARTA - Malaysia telah menjadi sasaran serangan mematikan yang jarang terjadi setelah seorang pria bersenjata parang menyerang kantor polisi di negara bagian Johor selatan. Tragedi ini menewaskan dua petugas polisi dan melukai sepertiganya.

Dikutip dari Al Jazeera, Selasa (21/5/2024), banyak pihak menilai serangan kelompok Jemaah Islamiyah (JI) di tanah Malaysia tampaknya tidak mungkin terjadi.

Awalnya, polisi Malaysia menduga insiden hari Jumat (17/5/2024) itu terkait dengan kelompok garis keras JI. Ditambahkan kemungkinan merupakan upaya pencurian senjata. Berbicara kepada media setelah penyerangan di kota Ulu Tiram, Irjen Polisi Razarudin Husain mengatakan polisi menggerebek rumah tersangka dan menemukan "perlengkapan terkait JI".

Lima anggota keluarganya ditangkap, termasuk ayah tersangka yang berusia 62 tahun, yang menurut polisi adalah "anggota JI yang diketahui". Dua orang lainnya, yang berada di kantor polisi membuat laporan pada saat penyerangan terjadi pada Jumat dini hari, juga ditahan.

Namun sehari kemudian, pada Sabtu (18/5/2024), Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail tampaknya menarik kembali hubungan dengan JI, dan menggambarkan penyerang tersebut sebagai "serigala tunggal" yang "didorong oleh motivasi tertentu berdasarkan pemahamannya sendiri karena ia jarang bergaul dengan orang lain".

Mantan anggota JI di Indonesia Ali Imron mengatakan kepada Al Jazeera, bahwa profil JI di Malaysia tampaknya tidak sesuai dengan serangan di kantor polisi.

Diketahui Ali Imron saat ini dipenjara di ibu kota Indonesia, Jakarta. Ia menjalani hukuman seumur hidup karena perannya dalam JI tahun 2002 Bom Bali yang menewaskan lebih dari 200 orang,

"Belum pernah ada anggota JI di Malaysia yang bersedia melakukan tindakan kekerasan seperti ini," ujarnya. "Sebelum bom Bali, ada serangan di Malaysia, tapi bukan dilakukan JI, melainkan Kelompok Mujahidin Malaysia (KMM)."

KMM, kelompok garis keras yang terkait dengan JI, melakukan serangan skala kecil di Malaysia pada awal tahun 2000an.

Ruben Dass, analis senior di S Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mencatat bahwa JI belum pernah melancarkan serangan di Malaysia.

"Malaysia selalu dianggap sebagai wilayah ekonomi bagi JI, bukan fokus



Anggota forensik polisi mengambil gambar di luar kantor polisi tempat seorang pria menyerbu di Ulu Tiram, negara bagian Johor, Malaysia pada 17 Mei. (AP)

serangan," katanya kepada Al Jazeera. "Pihak berwenang Malaysia selalu waspada dan waspada, terutama setelah KMM aktif. Mereka telah waspada dan melakukan gelombang penangkapan terhadap anggota JI pada awal tahun 2000an."

Sejak saat itu, kata dia, JI tidak terlalu menonjolkan diri. "Melihat mereka muncul lagi agak mengejutkan," tambahnya.

Judith Jacob, kepala Asia untuk analisis risiko dan perusahaan intelijen Torchlight, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa aspek yang paling tidak biasa dari serangan hari Jumat adalah lokasinya.

"Meskipun militan Malaysia telah menjadi tokoh kunci dalam JI dan kelompok-kelompok yang berbasis di Filipina, hanya ada sedikit indikasi adanya rencana canggih yang menargetkan Malaysia secara khusus dalam beberapa tahun terakhir," katanya.

Namun, meskipun tingkat kekerasan di Malaysia dan Indonesia belum mencapai tingkat yang sama seperti pada awal tahun 2000an, serangan-serangan tersebut belum sepenuhnya berhasil diberantas - dengan pola kekerasan yang lebih oportunistik dan tingkat rendah yang mulai bermunculan.

"Serangan di Malaysia masih dilakukan oleh kelompok militan Islam regional - dengan kata lain, ini adalah serangan yang relatif sederhana," kata Jacob.

"Kelompok-kelompok di Indonesia, khususnya, sebagian besar tidak mampu melakukan serangan skala besar atau pemboman terkoordinasi yang merupakan ciri khas JI pada masa kejayaannya di tahun 2000an. Kelompok militan di Filipina lebih mampu, namun mereka juga tidak mampu melakukan

pemboman canggih di luar pulau-pulau selatan."

Indonesia, yang mengalami serentetan serangan JI pada akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000an - termasuk serangan terhadap gereja pada Malam Natal tahun 2000, bom Bali, dan serangan terhadap Hotel JW Marriott di Jakarta pada tahun 2003 - juga telah berhasil dalam melakukan tindakan pemberantasan.

Pada tahun 2003, dengan pendanaan dan pelatihan dari Amerika Serikat dan Australia, mereka membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), dan kemudian membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Pihak berwenang di Indonesia juga telah memelopori a serangkaian program deradikalisasi menggunakan mantan anggota kelompok garis keras termasuk JI, dengan tingkat residivisme sekitar 11 persen, menurut Institute for Policy Analysis of Conflict, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Jakarta.

Menurut data sumber terbuka, antara tahun 2021 dan 2023, dari 610 orang yang ditangkap di Indonesia, 42 persen adalah JI dan 39 persen berasal dari kelompok garis keras lainnya - termasuk Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan kelompok pro-ISIS lainnya.

Singapura Perketat Keamanan

Keamanan di Singapura diperketat. Langkah itu diambil setelah penyerangan di kantor polisi Johor, Malaysia, oleh anggota Jemaah Islamiyah (JI).

Pengumuman pengetatan keamanan disampaikan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong pada Selasa (21/5/2024). Wong baru dilantik pada 15 Mei lalu.

"Serangan seperti itu, terjadi di

perbatasan kami, ini jadi pengingat suram bahwa ancaman terorisme tetap tinggi," kata Wong seperti dikutip dari AFP.

"Kami memperketat keamanan, termasuk di pos pemeriksaan," sambung dia.

Wong memerintahkan warga untuk melaporkan tindakan atau sosok mencurigakan sesegera mungkin ke aparat.

"Badan keamanan kami akan terus mengawasi perkembangan keamanan regional dan global dari dekat," kata Wong.

Serangan di Johor terjadi pekan lalu. Aksi pelaku bergolok menewaskan dua polisi Malaysia dan melukai seorang lainnya.

Dari hasil investigasi kepolisian, ayah pelaku terafiliasi dengan JI. Pelaku telah ditembak mati polisi saat beraksi. (widAl Jazeera, ist/dya)

KAWAN DAN LAWAN JEMAAH ISLAMIYAH (JI)

SEKUTU

Taliban al-Qaeda

LAWAN

Australia Filipina
Brunei Singapura
Indonesia Thailand
Malaysia AS

DICAP SEBAGAI

ORGANISASI TEROR OLEH:

PBB Kanada
AS Indonesia
Argentina Malaysia
Australia Selandia Baru
Bahrain
Britania Raya

